

WARGA OLAT RAWA MINTA PERBAIKAN JALAN

Oleh: admind

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Senin(13/12) yang dipimpin langsung Agus Salim dan didampingi Heruddin.SE, Bunardi, Ir.Nurdin Marjuni, Muhammad Atta. Adapun beberapa undangan yang hadir Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Dinas PU, Bappeda Kabupaten Sumbawa, dan Perwakilan Balai KPH Puncak Ngengas Batulante Habibi, dan dihadiri Camat Moyo Hilir Amiruddin.SH dan Kepala Desa Olat Rawa Supriyanto beserta tokoh Masyarakat. Terkait Kondisi Jalan menuju ke Dusun Tanjung Bele dan Nanga Lidam Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir.

Dalam kesempatan tersebut Camat Moyo Hilir Amiruddin mengungkapkan prihatin terhadap kondisi jalan yang menuju Dusun Nanga Lidam dan Tanjung Bele, katanya. Masyarakat Wilayah setempat sangat mengharapkan perbaikan Infrastruktur jalan. Perbaikan jalan menjadi Dambaan yang sangat lama dinanti oleh Masyarakat. Kaitan dengan mengapa hanya kawasan Tanjung Bele dipermasalahkan sementara kecamatan Ropang dan Lantung termasuk dalam kawasan juga, tetapi tidak dipermasalahkan. Untuk itu, Camat dan Masyarakat sangat berharap kepada Balai KPH Puncak Ngengas Batu Lanteh (Habibi) agar memberikan lampu hijau terkait dengan kawasan tersebut. Di hadapan Komisi III, Camat juga menyatakan bahwa masyarakat setempat tidak meminta hotmix, namun hanya pengerasan saja yang terpenting bisa tembus hingga Nanga Lidam dan Tanjung Bele.

Kades Olat Rawa Supriyanto memaparkan, Karena kondisi infrastruktur khususnya jalan yang sangat memprihatinkan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini Olat Rawa bahkan termasuk dalam kategori daerah miskin lantaran ada dua dusun tersebut. Padahal kedua dusun tersebut memiliki potensi besar, baik di peternakan, pertanian, nelayan tangkap serta yang paling dominan sekali adalah budi daya rumput lau, bahkan kualitas rumput lautnya diakui memiliki kualitas yang baik, ungkap Kepala Desa Olat Rawa.

Kabid Infrastruktur Wilayah Bappeda Priadi Prima Putra dalam pertemuan tersebut beralasan belum bisa diperbaiki jalan kedua dusun tersebut, karena keterbatasan anggaran. Dipaparkan, dari usulan Rp.200 miliar DAK tahun 2018, DAK dari pemerintah pusat yang turun ke Kabupaten Sumbawa sekitar seperempatnya, yakni hanya sekitar Rp.50 Miliar. Itu pun termasuk yang terbanyak untuk seluruh Provinsi.

Perwakilan Balai KPH Puncak Ngengas Batu Lanteh Habibi memaparkan bahwa, kawasan itu dikategorikan bukan hutan lindung. Namun hutan produksi Gili Ngara. Karena keseluruhan Olat Leke jumlah total luasnya sekitar 3000 hektar. Namun ada sebagian yang akses jalannya digunakan oleh Masyarakat Tanjung Bele dan Nanga Lidam yang dulunya adalah jalan inspeksi kehutanan. Berdasarkan aturan. Kalau dulu itu murni pinjam pakainya dikehutanan, kalau diatas 5 hektar itu kementerian kehutanan. Luas dari Tanjung Bele dan Nanga Lidam saya rasa kurang dari 5 hektar. Bunardi Anggota Komisi III DPRD mengharapkan agar permintaan warga ini didengarkan untuk dapat dilakukan pengerasan jalan menuju Tanjung Bele dan Nanga Lidam.

Ditambahkan oleh Hasanuddin SE Anggota Komisi III Drai Fraksi Nasdem bahwa usulan masyarakat ini akan diperjuangkan untuk dianggarkan pada APBD Perubahan 2018 berhubung untuk APBD murninya sudah ditetapkan pada akhir tahun ini.

Situs DPRD Kab. Sumbawa - www.dprd-sumbawakab.go.id